

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DINAS KEBERSIHAN KOTA MANADO

Murdiningsih

**Dibimbing oleh : 1 Dra. M. S. Pangkey, M.Si
2. Drs. Welson Y. Rompas, M.Si.**

***ABSTRACT** Trash has become a national issue that management needs to be done in a comprehensive and integrated headwaters downstream waste management necessary legal certainty, clarity of responsibility and authority of the government, local government, the role of the community and waste management can proceed professional, effectively and efficiently. So the president issued Law Decree No.18 of 2008 on Waste Management which aims to reduce the waste problem in Indonesia. Waste management aims to serve a city of garbage generated population, which indirectly contribute to maintaining public health and create a cleaner environment. To support the establishment of the provincial capital of Manado as a clean, healthy, comfortable, beautiful and environmentally friendly. Mayor of Manado making policy on Waste Management in the city of Manado, the policy was issued to strengthen the Regional Regulation No. 07 Year 2006 concerning Manado Waste Management and General Services Levies.*

In this study using the model of George C. Edwards III where implementation can be started from the abstract state and a question of whether the conditions for policy implementation to be successful is communication, communication is between implementing policies / programs with community target groups. Resources, is the human resources and financial resources available or provided for the implementation of policies / programs. Disposition, is characteristic that attaches to the executive like honesty, commitment and democratic attitudes. Bureaucratic structure, is the mechanism (SOP) and the structure of the organization implementing the policy. This study uses a qualitative descriptive approach through interviews of 11 informants, observation and tracking documents and research is assisted by an additional instrument in the form of a list of guidelines for interviewing, recording devices (Hand phone) and stationery.

The results showed that the overall waste management policy in Manado City Sanitation Department has shown a pretty good rate, in other words the implementation of solid waste management in terms of freight has been carried out effectively, but seen from the time of completion is still not efficient, since there are often delays garbage carry. Over all results of the interview on the results of the implementation of the waste management policy to the conclusion that the success rate in Waste Management Policy Implementation in Manado City Sanitation Department is quite good.

Keywords: *Implementation of Waste Management Policy*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volum, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke helir, pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien. Maka presiden mengeluarkan UU RI No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia.

Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sampah adalah masalah umat manusia, hal-hal negatif yang bisa diakibatkan oleh sampah adalah (1) Secara umum sampah bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar, karena untuk jenis sampah tertentu bisa menimbulkan sumber penyakit, (2) Sampah bisa menurunkan keindahan atau nilai estetika kota, dimana penanganan sampah yang buruk, (3) Sampah bisa menyebabkan polusi udara dan bau busuk

yang menyengat, (4) Sampah bisa menyebabkan bahaya banjir pada musim penghujan, dimana sampah yang tidak terangkut dapat menjadi penyumbat saluran-saluran air.

Berbagai upaya dilakukan untuk menangani pengelolaan sampah. Namun upaya tersebut kerap mengalami kendala, serta sebagian warga yang tidak disiplin dengan membuang sampah seenaknya. Salah satu yang menimbulkan masalah pengelolaan persampahan adalah besarnya biaya untuk menangani pengelolaan persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Biaya ini semakin lama semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dengan bertambahnya penduduk maka produksi sampah juga meningkat, oleh karena itu efektivitas pengolahan sampah harus ditingkatkan.

Pengelolaan persampahan suatu kota bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduknya, yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih. Saat ini pengelolaan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan

masyarakat baik produsen maupun konsumen.

Manado kini tergolong, sebagai kota besar dengan hiruk pikuk masyarakatnya yang beragam dan padat menghasilkan beberapa efek samping di antaranya berupa sampah jumlah penduduk kota manado saat ini \pm 500.000 jiwa sedangkan sampah yang di hasilkan per hari di Kota Manado adalah \pm 2000 (m^3 /hari). Untuk menujung terwujudnya Kota Manado sebagai ibukota Provinsi yang bersih,sehat,nyaman,indah dan ramah lingkungan. Wali Kota Manado membuat kebijakan tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Manado,untuk memperkuat kebijakan itu dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Manado No.07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Jasa Umum. Namun dalam menerapkan kebijakan dari pemerintah terjadi permasalahan diantaranya sering terjadi keterlambatan pengangkutan dari TPS menuju TPA menyebabkan tertumpukya sampah di TPS hal ini mempengaruhi keindahan Kota Manado. Dinas kebersihan merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang untuk mecapai tujuan/kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan pra survei yang di temukan peneliti di Dinas Kebersihan Kota Manado di sebabkan

minimnya kapasitas angkut armada yang tersedia di Dinas Kebersihan Kota Manado. Efektifitas kerja dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sangat penting, waktu merupakan sumber berharga,efktifitas diartikan penyelesaian suatu kegiatan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Hal ini juga mengukur bagaimana suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak.

Kondisi tersebut berdampak pada tidak maksimalya implementasi kebijakan pengelolaan persampahan. Dan ini berlangsung terus menerus dari waktu ke waktu sehingga belum di temukan solusi yang tepat untuk mengatasinya, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitan lebih jauh dengan judul peneltian : “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Dinas Kebersihan Kota Manado”.

METODE PENELITIAN

A. Penelitian Kualitatif

Moleong mengatakan,penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku,persepsi,tindakan, dan lainnya) secara holistik,dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,pada

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Itulah alasan mengapa peneliti mengambil penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dengan demikian melalui penelitian deskriptif kualitatif ini hanya berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Dinas Kebersihan Kota Manado, dan kemudian menganalisisnya sampai pada suatu kesimpulan absolut.

B. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan dalam penelitian ini sebagaimana telah dikemukakan bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah proses Implementasi kebijakan, ialah:

1. Rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini proses implementasi dilihat dari 4 faktor penting dalam pencapaian implementasi, yaitu : (1) komunikasi ialah komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran; (2) sumberdaya ialah sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial yang tersedia atau

disediakan untuk pelaksanaan kebijakan; (3) disposisi ialah karakteristik yang menempel kepada para pelaksana seperti kejujuran, komitmen dan sikap demokratis; (4) struktur birokrasi ialah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana.

2. Hasil kebijakan yang dilihat dari tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kota Manado.

C. Sumber Data (Informan)

Sumber data yang diperoleh peneliti untuk penelitian ini adalah sumber langsung (data primer) dari informasi/responden yang ditentukan tentang Pengelolaan Persampahan di Dinas Kebersihan Kota Manado. Selain itu juga dikumpulkan data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang berfungsi sebagai pelengkap data primer.

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari dua unsur yaitu aparat/pegawai Dinas Kebersihan Kota Manado dan masyarakat. Sumber data direncanakan sebanyak 1 orang Pimpinan, 1 Orang di Kepala Bidang. Kemudian unsur masyarakat sebanyak 9 orang yang diambil dari 9 Kecamatan (setiap kecamatan

1 orang). Jadi jumlah informan adalah sebanyak 11 orang.

A. Instrumen Dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif tidak akan terlepas dari keberadaan instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan. Wawancara, dokumentasi dan observasi adalah sebagian contoh instrumen penelitian kualitatif yang menjadi senjata menggali data dari sumber-sumber informasi. Akan tetapi, sebenarnya instrument paling penting dalam jenis penelitian ini adalah sang peneliti sendiri.

Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik, yaitu :

1. Pelaku Wawancara

Wawancara adalah kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan. Dalam wawancara alat yang digunakan adalah alat pemandu (interview guide). Metode ini dapat juga dikatakan sebagai wawancara semistruktural (survey semistruktural), karena alat bantu tidak komplet seperti pada kuesioner. Panduan atau pertanyaan

pada kuesioner. Panduan atau pertanyaan pada kuesioner tersusun sedemikian rupa menurut urutan dan penggolongan data yang diperlukan. Berbeda dengan percakapan, wawancara lebih banyak pasif, atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.

Di sini peneliti langsung mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.

2. Observasi

Dalam penelitian ini teknik observasi atau pengamatan yang digunakan adalah observasi berpartisipatif (*observation participant*).

3. Studi Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian peneliti juga menemukan sumber data sekunder, pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

B. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut (Prof. J.L. Moleong, 2004) yaitu dipadukan dan dianalisis secara kualitatif dengan memberikan interpretasi/penafsiran atas fakta-fakta tersebut. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi yang terjadi dengan di lakukan secara induktif berdasarkan data yang di peroleh, yang selanjutnya penulis akan mengembangkan melalui suatu hubungan untuk mendapatkan kesimpulannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Wawancara

Deskripsi hasil wawancara dengan 11 orang informan sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dibuat rangkuman sesuai fokus penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Komunkasi

Semua informan yang diwawancarai menyatakan bahwa komunikasi antar pimpinan kepada pegawai serta kepada masyarakat sudah baik. Informasi tentang kebijakan pengelolaan persampahan diinformasikan melalui beberapa media termasuk sosialisasi yang

dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Seluruh informan menyatakan bahwa informasi yang diberikan sudah jelas dan transparan.

2. Sumber Daya

Pada umumnya informan menyatakan jumlah pegawai/tenaga kerja pelaksanaan kebijakan pengelolaan persampahan sudah memadai jika dibandingkan dengan banyaknya beban kerja. Menurut beberapa informan pegawai/tenaga kerja dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah memiliki serta memahami pengetahuan dan informasi memadai tentang kebijakan ini. Pegawai atau petugas pelaksanaannya pun adalah orang-orang pilihan yang telah memiliki keahlian/keterampilan dibidang tugas masing-masing. Untuk biaya pelaksanaan kebijakan ini hampir semua informan menyatakan bahwa mereka adalah masyarakat yang disiplin membayar retribusi persampahan. Pada umumnya menurut informan menyatakan kebijakan pengelolaan persampahan sudah berjalan efektif, tapi jika dilihat dari hasil dilapangan dari segi pengangkutan sampah masih terjadi keterlambatan pengangkutan sampah, yang disebabkan kurangnya

fasilitas pendukung seperti kendaraan pengangkut sampah. Dan jika dilihat dari segi pewadahan (TPS) dari hasil dilapangan beberapa informan menyatakan keterjangkauannya masih kurang memadai.

3. Disposisi atau sikap

Pada umumnya informan yang diwawancari menyatakan bahwa semua komponen baik pimpinan pegawai/tenaga kerja mendukung sepenuhnya terhadap implemantasi kebijakan pengelolaan persampahan. Pengelolaan persampahan merupakan kebijakan yang dijadikan prioritas utama. Hanya saja dalam pelaksanaannya sikap komitmen terhadap keberhasilan pelaksana tidak semua memiliki komitmen yang tinggi, menurut informan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini pimpinan sudah menyediakan dana yang cukup insentif untuk para pegawai.

4. Struktur Birokrasi

Pada umumnya semua informan mengatakan untuk struktur birokrasi sudah ditata dengan jelas, untuk standar operasional prosedur telah tersedia dan dapat dipahami, karena SOP telah dijalankan lewat pekerjaan sehari-hari oleh pegawai/petugas

pelaksana, dan hampir semua informan menyatakan untuk standar waktu penyelesaian pengelolaan persampahan pelaksana tidak dapat memastikan, karena ada kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan persampahan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Kebijakan pengelolaan persampahan berdasarkan peraturan daerah No.07 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Jasa Umum merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Manado dan berdasarkan peraturan Wali Kota Manado. Guna menjang terwujudnya Kota Manado sebagai ibukota Provinsi yang bersih, sehat, nyaman, indah dan ramah lingkungan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan yang pemerintah buat adalah tentang pelayanan persampahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, yang bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduknya, yang secara tidak langsung turut

memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih.

Dalam penelitian ini hasil implementasi kebijakan dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi pelayanan yang sudah dilakukan. Komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi antar pimpinan, pegawai dan masyarakat sudah baik. Informasi tentang kebijakan pengelolaan persampahan diberitahukan secara jelas dari pimpinan kepada masyarakat setempat lewat kepala bidang persampahan maupun pegawai.

Sumber daya menunjukkan bahwa jumlah pegawai pelaksanaan kebijakan pengelolaan persampahan sudah memadai dibandingkan banyaknya beban kerja yang ada. Sedangkan dari segi peralatan pendukung pelaksanaan kebijakan ini seperti kendaraan pengangkut sampah masih kurang memadai.

Disposisi menunjukkan bahwa untuk kebijakan pengelolaan persampahan semua unsur/komponen pemerintah baik pimpinan maupun pegawai mendukung sepenuhnya terhadap implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan. Di Dinas Kebersihan merupakan kebijakan/kegiatan yang di prioritaskan. Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksana kebijakan pengelolaan persampahan,

pimpinan telah menyediakan dana yang cukup insentif untuk para pegawai.

Struktur Birokrasi menunjukkan bahwa untuk struktur organisasi sudah tertata dengan baik dan jelas. Untuk standar operasional prosedur telah tersedia dan dipahami oleh petugas pelaksana karena SOP telah dijalankan lewat pekerjaan sehari-hari oleh petugas/pegawai pelaksana.

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Dinas Kebersihan Kota Manado sudah dilaksanakan dengan baik,serta sudah cukup efektif. Berdasarkan hasil peneitian dari hasil wawancara dan dokumentasi dalam penerapan implementasi kebijakan pengelolaan persampahan pemerintah dihadapkan dengan kendala/hambatan, dimana sering terjadi keterlambatan pengangkutan sampah,tetapi tindakan/upaya terus dilakukan pemerintah untuk mengatasinya. Hal ini disebabkan karena masih minimnya kendaraan yang tersedia di Dinas Kebersihan. Untuk standar waktu penyelesaia pengelolaan persampahan sudah di tetapkan namun dalam pelaksanaanya tidak dapat dipastikan. Berdasarkan hasil yang ditemui dilapangan

hampir semua informan mengatakan dari segi pewardahan (TPS) jauh dijangkau oleh masyarakat. Menurut semua informan komunikasi yang diberikan sudah jelas dan transparan, dan dalam pelaksanaannya pemerintah sudah bersungguh-sungguh, karena walaupun sering terjadi kendala/hambatan namun upaya untuk mengatasi kendala/hambatan ini terus dilakukan. Untuk menunjang pelaksanaan kebijakan ini agar terlaksana dengan baik, maka pemerintah sudah menentukan wajib retribusi persampahan setiap bulannya, dan hasil yang didapat dari wawancara bahwa semua masyarakat sudah memberikan wajib retribusi yang sudah ditentukan pemerintah. Para pegawai/tenaga kerja dalam pelaksanaan kebijakan ini merupakan orang-orang yang ahli dibidangnya masing-masing. Untuk semua unsur/komponen dipemerintahan baik pimpinan maupun staf mendukung sepenuhnya terhadap implementasi kebijakan ini. Kebijakan ini akan berhasil optimal apabila standar waktu yang ditentukan sudah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kebijakan pengelolaan persampahan di Dinas Kebersihan Kota Manado sudah menunjukkan tingkat yang cukup baik dengan kata lain pelaksanaan

pengelolaan persampahan dari segi pengangkutan sudah dilaksanakan dengan efektif, namun dilihat dari waktu penyelesaian masih belum efisien, karena sering terjadi keterlambatan pengangkutan sampah. Keseluruhan hasil wawancara tentang hasil implementasi kebijakan pengelolaan persampahan tersebut memberikan kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Di Dinas Kebersihan Kota Manado cukup baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang dilihat dari fokus penelitian yaitu : 1) proses implementasi kebijakan yang dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. 2) implementasi kebijakan pengelolaan persampahann di Dinas Kebersihan Kota Manado yang dilihat dari segi efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Proses implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Dinas Kebersihan Kota Manado dilihat dari aspek : komunikasi (antara penyelenggara kebijakan dengan kelompok sasaran), sumberdaya

(ketersediaan dan kecukupan SDM dan sumberdaya finansial), disposisi (kesediaan dan komitmen pelaksana kebijakan), struktur birokrasi (mekanisme dan struktur organisasi pelaksana/pembagian tugas dan tanggung jawab).

Dari empat aspek tersebut yang terindikasi belum optimal adalah aspek sumberdaya yaitu fasilitas pendukung yakni kendaraan pengangkut sampah, yang dirasakan masih kurang memadai jika dibandingkan dengan banyaknya volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Serta sarana umum seperti TPS yang kurang memadai dari segi keterjangkauannya.

2. Implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Dinas Kebersihan Kota Manado yang dilihat dari keefektifan pelaksanaannya sudah baik, namun belum cukup efisien karena dari segi waktu penyelesaiannya masih tidak sesuai dengan yang diharapkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang perlu dikemukakan dan direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan persampahan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan persampahan, maka Dinas Kebersihan Kota Manado melakukan pengusulan anggaran untuk penambahan fasilitas pendukung berupa kendaraan pengangkut sampah bagi Dinas Kebersihan kepada Pemerintah Kota untuk dianggarkan dalam APBD.
2. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan persampahan, maka pemerintah kota khususnya Dinas Kebersihan Kota Manado untuk meninjau kembali letak TPS agar mudah dijangkau oleh masyarakat, dan disarankan perlu dilakukan penambahan TPS.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin, 1991. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S.,2000, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar,Azrul. 1998. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Yayasan Penerbit Ikatan Dokter Indonesia.
- Bungin, B. M., 2010, *Penelitian Kualitatif*. PT. Kencana, Jakarta.
- Dye, Thomas R. 1987. *Policy Analysis*, USA: The University of Alabama press.

- George III Edward 1980, *Implementig Publik Policy*,
- Keban, Y. T., 2008, *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik : Konsep Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta.
- Kusumanegara, S., 2010, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta.
- Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju cv.
- Moleong, Lexy J. 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pt. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Pfiffner, John and Roberto V. Presthus. 1960. *Public Administration*. New york : The Ronald Press..
- Putra, Fadillah, 2011, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Saefudin. 1998. *Sampah Dan Penanggulaganya*. Bandung: Titian Ilmu.
- Suradinata, Ermaya, 1994. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan*, Bandung: Ramadhan
- Syafi'ie Kencana Inu,dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Teti Suryati. 2009. *Bijak Dan Cerdas Mengelolah Sampah*. Jakarta: PT Agromedia Pustaka.
- BPS Kota Manado.
- Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Manado.
- Diktat Pengelolaan Sampah (2008).
- Peraturan Daerah Kota Manado No.07 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2008.
- Peraturan Walikota Manado No 29 Tahun 2008.
- UUD No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU RI No.18 Tahun 2008 Tentang Pegelolaan Sampah.

Sumber lain :